

**Strategi Patkor Kastima dalam Mencegah Penyelundupan Barang
Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia Tahun 2015 - 2017**

Maria Ulfa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini mengangkat isu kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang kepabeanan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa patroli laut adalah salah satu metode kerja sama kepabeanan pemerintah Indonesia-Malaysia dalam mencegah penyelundupan barang ilegal. Patroli tersebut dinamakan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia atau biasa disingkat dengan sebutan Patkor Kastima. Indonesia memiliki sektor operasi patrolinya mulai dari Aceh hingga Batam, sedangkan Malaysia yakni mulai dari Langkawi hingga Johor. Kemudian, Patkor Kastima mampu mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia, serta peningkatan penerimaan negara. Kerja sama tersebut tidak hanya terfokus pada sisi pencegahan saja, melainkan juga untuk menjalin hubungan yang erat serta koordinasi yang baik dengan Malaysia.

Kata kunci: Patkor Kastima, Penyelundupan Barang Ilegal, Malaysia, Indonesia .

Pendahuluan

Selat Malaka yang terletak di wilayah perairan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan sekitar 70.000 kapal yang melintas tiap tahunnya, atau sekitar 150 - 200 kapal per hari.¹ Sebagai jalur perdagangan yang paling sering dilalui oleh kapal, potensi pelanggaran di wilayah Selat Malaka kerap kali terjadi, seiring dengan pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, di mana dunia menjadi semakin *borderless* sehingga meningkatkan potensi terjadinya *transnational crime* atau kejahatan transnasional. Menurut Emmers, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang dilakukan lintas negara sehingga dapat menjadi ancaman negara lain.² Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.³ Salah satu contoh kejahatan transnasional yang sering terjadi adalah penyelundupan barang ilegal yang nantinya akan diperdagangkan secara ilegal oleh para *trafficker*.

Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia membentuk sebuah institusi yang memiliki wewenang untuk mengatasi segala bentuk persoalan keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut, yaitu Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) yang dikendalikan oleh Komando Utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Letak pangkalan utamanya berada di Tanjung Pinang dan Belawan. Sedangkan, pangkalan pendukungnya terletak di Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang,

¹ "Internasionalisasi Selat Malaka", Edy Burmansyah, diakses pada 24 Januari 2019, <http://indoprogess.com/2016/06/internasionalisasi-selat-malaka/>.

² Ralf Emmers, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, (Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003), 1 - 2.

³ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

dan Mempawah.⁴ Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata, dan Pantai Barat Sumatra menjadi wilayah pengawasan Koarmabar dan tiga Brigade Marinir.

Selain itu, institusi yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan di Selat Malaka adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memperketat dan menjaga arus lalu lintas kapal di wilayah Selat Malaka.⁵ Bea Cukai memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pada kapal-kapal yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Kepabeanan untuk menghindari adanya potensi pelanggaran seiring dengan meningkatnya arus lalu lintas kapal di wilayah Selat Malaka. Dalam menangani hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Bea Cukai guna melakukan pengawasan adalah melaksanakan operasi patroli secara terkoordinasi dengan institusi kepabeanan negara tetangga yang dekat dengan perbatasannya, yaitu Kastam Malaysia.

Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama bilateral melalui operasi patroli terkoordinasi yang disebut sebagai Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) karena kedua negara tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga perbatasan Selat Malaka.⁶ Selain itu, operasi tersebut juga merupakan bukti kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang kepabeanan sejak tahun 1994. Untuk mendukung Operasi Patkor Kastima, kedua badan bea cukai ini melakukan beberapa hal. Bea Cukai Indonesia memberikan sepuluh kapal dengan 140 personil dan Kastam Malaysia menyerahkan sembilan kapal dengan 90 personil. Selain itu, mereka juga melakukan pertukaran intelijen.

⁴ "Keamanan Maritim di Selat Malaka", Igor Dirgantara, diakses 14 Desember 2018,

<https://igordirgantara.wordpress.com/2010/03/16/keamanan-maritim-di-selat-malaka/.html>.

⁵ "Indonesia-Malaysia Gelar Patkor Kastima untuk Jaga Selat Malaka", Nurandini Alya Sam, diakses 11 November 2018, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/23/153100026/indonesia-malaysia-gelar-patkor-kastima-untuk-jaga-selat-malaka.html>.

⁶ "Patkor Kastima Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka", Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, diakses pada 8 Desember 2018, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyata-indonesia-malaysia-jaga-selat-malaka.html>.

Operasi Patkor Kastima kini telah berjalan selama 23 tahun. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua bea cukai tersebut menemukan temuan penyelundupan barang ilegal setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Bea Cukai Indonesia melaporkan bahwa terdapat 178 penindakan. Kemudian, di tahun 2016 terdapat lonjakan hingga mencapai 405 penindakan. Sedangkan di tahun 2017 data penindakan menunjukkan adanya penurunan kasus menjadi 279 kasus.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, tentunya pembahsan dalam hal ini akan sangat luas, namun fokus penelitian ini terletak pada dinamika kerja sama Indonesia-Malaysia dalam menjalankan Operasi Patkor Kastima sebagai bentuk pencegahan dari penyelundupan barang ilegal. Hal yang cukup berbeda dalam tindakan mitigasi penyelundupan barang ilegal ini terletak pada penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan yaitu bagaimana bentuk Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan pemerintah Indonesia-Malaysia terhadap penyelundupan barang ilegal pada tahun 2015 - 2017?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang sistematis sehingga mampu membantu peneliti dalam memperoleh pengetahuan dengan cara yang efisien.⁸ Spencer menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki fungsi untuk menemukan perspektif aktor dan memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman. Dalam penelitian kualitatif, metode sangat sensitif dan menggunakan metode semi-terstruktur,

⁷ "Patkor Kastima Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka", Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, diakses pada 8 Desember 2018, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyata-indonesia-malaysia-jaga-selat-malaka.html>.

⁸ John C. King, "Qualitative Research Method in International Affairs for Master Student," *Journal of American University*, 2015, https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf

penggalan data sebanyak-banyaknya, serta pertanyaan yang diajukan meliputi bagaimana dan mengapa.⁹

Penelitian jenis kualitatif sendiri berlandaskan pada paham post-positivistik yang percaya terhadap adanya maksud di balik hal yang tidak terlihat.¹⁰ Sedangkan, untuk mendeskripsikan fenomena internasional yang dinamis merupakan tujuan dari penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Ketelitian dan wawasan yang jelas dan impresif mengenai Hubungan Internasional telah diberikan oleh penelitian kualitatif.¹¹ Secara umum, rujukan dari metode kualitatif adalah berdasarkan data non-numerik saat melakukan pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode kualitatif yang dimaksud di sini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis dan diformalkan menjadi angka-angka. Hal tersebut guna mendeskripsikan dengan cara menarasikan beragam alat dan sumber daya alam (SDA).¹² Adapun strategi untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu dengan cara *interview*, *focus group discussion* (FGD), menggali data sekunder dengan cara melakukan penelitian berbasis internet, dan penelitian berbasis dokumen atau arsip (*archival and document-based research*).

Penelitian kualitatif deskriptif mengenai Operasi Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepacean Indonesia dan Malaysia dalam menghindari praktik penyelundupan barang ilegal mendeskripsikan mengenai kerja sama kepacean

⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2011), 1 - 3.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 7.

¹¹ Andrew Moravcsik, "Trust, but Verify: The Transparency Revolution and Qualitative International Relations", dalam *Security Studies*, dalam Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 61.

¹² Christopher Lamont, *Research Method in International Relations*, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2015), 78.

antarnegara yang dibantu dengan menggunakan teori kerja sama internasional Haas. Teori tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Peneliti memutuskan untuk mengumpulkan data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia di bidang kepabeanan. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat korelasional yang mendeskripsikan Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia. Obyek penelitian ditujukan kepada Patkor Kastima dalam mencegah penyelundupan barang ilegal di Selat Malaka, seperti penyelundupan pakaian bekas, narkoba, bawang, serta penyelundupan barang-barang ilegal yang tidak disertai dengan dokumen resmi. Peneliti memperoleh data primer dari informan yang terkait dengan kerja sama bilateral antara Indonesia-Malaysia di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga, Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai macam sumber.

Tingkat analisis dalam sebuah penelitian juga bisa disebut sebagai subyek penelitian. Yang dimaksud subyek dalam sebuah penelitian adalah seorang informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, informasi dari informan akan dijadikan sebagai data dalam penelitian. Dalam memilih subyek penelitian, peneliti akan menerapkan teknik *nonprobability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah dari Sub Direktorat Patroli Laut di Kantor Bea Cukai Pusat. Subyek penelitian yang dimaksud adalah Pemerintah Indonesia sebagai *state actor* yang kemudian diintegrasikan pada pihak terkait di bidang kepabeanan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menjabarkan hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan data adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menurut Setiawan, metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang berguna untuk mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.¹³

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion/verification*).¹⁴

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti berangkat berdasarkan teori. Kemudian, peneliti melihat adanya fenomena yang ada. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan logika induktif sebagai dasar membuat proposal penelitian dan kemudian peneliti memilih metode penelitian ini dengan metode kualitatif dengan pendekatann deskriptif.

Tinjauan Pustaka

Jurnal berjudul “Kerja Sama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia” yang ditulis oleh Sitepu, Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang. Dalam jurnal tersebut, Sitepu membahas tentang kerja sama kepabeanan dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Melalui metode penelitian kualitatif dan analisis data deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penelitian pada jurnal ini menggunakan konsep saling menghargai.¹⁵

¹³ Dodiet Aditya Setiawan, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurusan Akunpunktur Poltekkes Kemenkes, 2013), 9.

¹⁴ Omi Sarah, “Model Kebijakan Halal Tourism yang Ditetapkan dalam Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat”, (S.Sos., Skrip, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁵ Ria Ariesti Br Sitepu, *Kerja Sama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kerja sama menanggulangi penyelundupan pakaian bekas. Pertama, tidak tercapainya *absolute gain*, yaitu merupakan konsep penting yang dipikirkan oleh negara yang akan menyerahkan dirinya untuk terlibat dalam sebuah perjanjian. Kedua, tidak adanya kesamaan kepentingan. Ketiga, prinsip dan norma di Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) menghambat terbentuknya kerja sama. Dalam jurnalnya, Sitepu menganalisis bahwa meskipun upaya kerja sama dalam penanggulangan *ballpress* pakaian bekas belum ada dan terlihat sulit untuk dicapai, namun kedua negara tetap patuh pada ASEAN Agreement on Customs yang mendorong anggota-anggotanya untuk saling bertukar informasi. Pertukaran informasi DJBC dan JKDM memberikan kemudahan bagi pihak kepabeanan Indonesia untuk menangkap para jaringan penyelundupan.¹⁶

Penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya memiliki sisi perbedaan, yaitu penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian terhadap penyelundupan pakaian, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan obyek penelitiannya terhadap barang ilegal. Kemudian, peneliti sebelumnya membahas kerja sama Indonesia-Malaysia hanya di bidang kepabeanan saja, akan tetapi peneliti selanjutnya lebih spesifik pada bagaimana bentuk Operasi Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi literatur, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan definisi konseptual, namun penelitian selanjutnya menggunakan tiga definisi konseptual, yaitu Patkor Kastima, kerja sama kepabeanan, dan penyelundupan barang ilegal.

¹⁶ Ria Ariesti Br Sitepu, *Kerja Sama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

Selain itu, terdapat skripsi yang berjudul “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba” yang ditulis oleh Aditya, Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut, Aditya mengangkat topik pembahasan tentang peran kerja sama Indonesia-Malaysia dalam menangani peredaran narkoba melalui Polisi Republik Indonesia (Polri). Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Teori yang digunakan adalah teori kerja sama internasional.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada studi penelitiannya, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan Bea Cukai sebagai studi penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas kerja sama Indonesia-Malaysia melalui Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama antara Polri dan PDRM serta program edukasi dalam mencegah peredaran narkoba, sedangkan penelitian selanjutnya membahas mengenai bagaimana bentuk Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia.

Kemudian terdapat skripsi yang ditulis oleh Natiqoh dengan judul “Kebijakan ASEAN dalam Menangani Masalah Drugs Trafficking di Indonesia Periode 2003 - 2008” yang membahas mengenai kebijakan ASEAN dalam menangani *drugs trafficking* pada 2003 - 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan tiga konsep dan teori, antara lain kerja sama regional, keamanan, dan *human security*.¹⁸

¹⁷ Wisnu Aditya, “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba”, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2017.

¹⁸ Natiqoh, “Kebijakan ASEAN dalam Menangani Masalah Drugs Trafficking di Indonesia Periode 2003 - 2008”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Penelitian sebelumnya menggunakan subyek penelitian ASEAN pada penelitiannya. Namun, penelitian selanjutnya menggunakan Pemerintah Indonesia-Malaysia sebagai subyek penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas kebijakan ASEAN dalam menangani *drugs trafficking* di Indonesia tahun 2003 - 2008. Namun, penelitian selanjutnya membahas bagaimana bentuk Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam mencegah masuknya barang ilegal tahun 2015 - 2017.

Kemudian yang terakhir adalah jurnal dengan judul “Strategi Hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015” yang ditulis oleh Istiqomah dari Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.¹⁹

Dalam penulisan jurnal tersebut terdapat sisi perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya membahas strategi Indonesia dengan Malaysia dalam mewujudkan “Drug Free ASEAN 2015”, namun penelitian selanjutnya membahas tentang bagaimana bentuk Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam mencegah penyelundupan barang ilegal.

Kerja Sama Internasional

Dalam menjelaskan fenomena tersebut, peneliti akan menggunakan teori kerja sama internasional dan bilateral. Sebelum membahas mengenai kedua teori tersebut, perlu diketahui konsep kerja sama, yaitu sebuah perilaku yang dirancang untuk lebih menguntungkan kelompok daripada individu. Dalam organisasi internasional, kerja sama merupakan hubungan yang baik dan disahkan secara hukum serta tidak didasari

¹⁹ Ratih Nur Istiqomah, “Strategi Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015”, Universitas Diponegoro Semarang, 2016.

dengan kekerasan.²⁰ Sebagai respon terhadap berbagai pilihan, para aktor akan menyesuaikan perilakunya untuk menciptakan sebuah kerja sama yang baik yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama.

Selain itu, timbulnya kerja sama adalah sebagai bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan diri. Dalam bekerja sama terdapat kunci penting untuk menjaga perilaku bekerja sama, yaitu dengan cara mempercayai mitra yang akan diajak bekerja sama sebelum melakukan kerja sama. Jadi, dalam teori kerja sama terdapat isu utama, yaitu “Pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerja sama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi”.²¹

Adapun penyebab dari terjadinya sebuah kerja sama menurut Holsti dikarenakan oleh adanya keberagaman dalam suatu permasalahan nasional, regional, maupun global. Permasalahan ini kemudian akan diselesaikan oleh pihak yang melakukan kerja sama melalui diskusi yang diakhiri dengan perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak untuk saling melakukan pendekatan. Selanjutnya, Holsti mengemukakan tentang beberapa definisi kerja sama, yaitu yang pertama adalah adanya dua atau lebih kepentingan, tujuan, atau nilai yang bersinggungan dan dapat menghasilkan sesuatu yang dijunjung dan dipenuhi oleh semua pihak. Definisi selanjutnya adalah persetujuan atas masalah tertentu di antara minimal dua negara untuk memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan. Kemudian terdapat pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diambil dapat

²⁰ James E. Dougherty dan Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publishers, 1997), 418 - 419.

²¹ James E. Dougherty dan Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publishers, 1997), 418 - 419.

membantunya untuk mencapai kepentingannya. Yang terakhir adalah aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka.²²

Adanya kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri dapat menimbulkan sebuah kerja sama internasional. Kepentingan bersama juga menjadi pertimbangan utama mengapa sebuah negara menjalin kerja sama dengan negara lain. Selain itu, kerja sama internasional muncul karena adanya berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan internasional.²³ Kerja sama internasional merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dihindari akibat adanya ketidakmerataan sumber daya dan hubungan *interdependency* atau saling ketergantungan.

Menurut Kartasmita, kerja sama internasional dapat dipahami sebagai sebuah keharusan karena adanya hubungan interdependensi, terlebih dengan hubungan manusia dalam masyarakat internasional yang semakin kompleks. Kerja sama internasional didasari oleh *national understanding* dengan kesamaan tujuan. Selain itu juga didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Sehingga kerja sama dilandasi oleh kepentingan bersama antarnegara walaupun kepentingan tersebut tidak identik.²⁴

Kerja sama internasional memiliki sifat yang beraneka ragam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerja sama internasional paling kuat). Sebuah kerja sama akan terjadi apabila terdapat dua kepentingan yang bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Dalam sebuah kerja sama, suatu konflik tidak akan dapat dihindari, tetapi

²² K. J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka untuk Dianalisis*, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1987), 652 - 653.

²³ A. A. Perwita dan Y. M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2005), 33 - 34.

²⁴ Koesnadi Kartasmita, *Administrasi Internasional*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997), 20.

dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerja sama dalam kepentingan. Dalam suatu kerja sama internasional, terdapat tiga tingkatan yang meliputi:

“(1) Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerja sama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat; (2) kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerja sama yang aktif di antara negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dalam memenuhi kepentingan masing-masing; serta (3) integrasi, merupakan kerja sama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan di antara negara-negara terlibat”.²⁵

Lingkup aktivitas dalam kerja sama internasional antarnegara meliputi berbagai kerja sama multidimensi, seperti kerja sama ekonomi, sosial, dan politik. Dengan adanya lingkup aktivitas tersebut, suatu kerja sama diformulasikan dalam sebuah wadah, yaitu organisasi internasional. “Organisasi internasional merupakan suatu alat yang dapat memudahkan setiap anggotanya dalam menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya”.²⁶

Kerjasama Bilateral

Selain kerja sama internasional yang melibatkan banyak negara, sebuah negara juga melakukan kerja sama bilateral atau kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerja sama bilateral dilakukan karena terdapat kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan.²⁷ Keohane mengemukakan pendapatnya bahwa kerja sama terjadi pada saat para aktor (*state* atau *non-state*) menyesuaikan

²⁵ Michael Smith dan Brian Hocking, *World Politics: An Introductory to International Relations*, (Harvester Wheatsurf, 1990), 222.

²⁶ Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin, (Bandung: Putra A. Bardin, 1979), 271.

²⁷ Yanuar Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 273.

perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui adanya proses koordinasi kebijakan.

Menurut Kusumohamidjojo, kerja sama bilateral adalah:

“Suatu bentuk kerja sama yang memiliki sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi di antara negara-negara yang berdekatan secara letak geografisnya hingga yang jauh sekalipun seperti di seberang lautan”.²⁸

Terciptanya hubungan bilateral adalah untuk menyelenggarakan politik luar negeri masing-masing negara. Selain itu, dalam melakukan kerja sama bilateral juga terdapat beberapa kesepahaman antara kedua negara yang sedang melakukan hubungan kerja sama. Setiap bangsa pasti memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai. Hal tersebut juga telah dikemukakan oleh Plano dan Olton yang berpendapat bahwa hubungan kerja sama bilateral tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara karena hal tersebut merupakan unsur yang paling utama yang meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, kemerdekaan, militer, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi.²⁹

Sedangkan menurut Krisna, hubungan bilateral adalah hubungan yang saling mempengaruhi terjadinya hubungan timbal balik antara dua negara. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerja sama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Namun, dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah keamanan dalam segi kepabeanan.

Holsty dan Azhary lebih lanjut menyatakan bahwa:

“Macam-macam variabel yang harus diperhitungkan dalam suatu kerja sama bilateral ialah (1) suatu negara memiliki kualitas dan kuantitas kapabilitas; (2) keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai

²⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis*, (Bandung: Binacipta, 1987), 3.

²⁹ Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin, (Bandung: Putra A. Bardin, 1979), 7.

tujuan; (3) kredibilitas ancaman serta gangguan; serta (4) derajat kebutuhan dan ketergantungan”.³⁰

Dalam hubungan bilateral, terdapat dua unsur pemaknaan, yaitu konflik dan kerja sama. Keduanya memiliki arti yang saling berkesinambungan, tergantung dari konsep apa yang ditawarkan di antara kedua negara yang akan melakukan kerja sama, misalnya dari motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Seperti yang dikemukakan Coplin bahwa:

“Dalam sebuah kerja sama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama”.³¹

Dalam kaitannya dengan *rationality and foreign policy*, Viotti telah menjelaskan bahwa, “Adanya penentu sasaran, mitra hubungan adalah pilihan yang realistis dengan memperhitungkan kondisi domestik demi meminimalisir kerugian politik serta mempertahankan posisi politik di kancah internasional”.³² Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai. Frankel juga mengatakan bahwa apabila pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya lebih sedikit daripada manfaatnya, maka negara-negara akan melakukan kerja sama.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Operasi Patkor Kastima antara Indonesia dengan Malaysia dilakukan atas dasar kerja sama bilateral antara dua negara, yaitu

³⁰ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 199), 22.

³¹ William Coplin, *Pengantar: Politik Internasional Suatu Telaah*, Terjemahan Mercedes Marbun, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 263.

³² Viorti, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, (Boston: Ally and Bacon, 1987), 527.

Indonesia dan Malaysia sebagai upaya untuk menangkal masuknya barang ilegal di kedua negara.

Proses dan Bentuk Kerja Sama Kepabeanan Patkor Kastima

Dalam pelaksanaan kerja sama kepabeanan Patkor Kastima, Indonesia dan Malaysia memiliki forum khusus antara kedua negara yang bernama Coordinated Operations Control Committee Malaysia-Indonesia (COCC Malindo). COCC Malindo berada di bawah High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo). COCC Malindo ini diketuai oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Markas Angkatan Tentara Malaysia. Adapun badan-badan yang dibawah oleh COCC Malindo yaitu Tim Perancang Intelijen (TPI), Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), Kelompok Kerja *Search and Rescue* (KK SAR), dan Tim Perancang Komplek (TPK).³³

Adapun hasil dari pertemuan ke-64 COCC Malindo, yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 di Jakarta menghasilkan arahan atau penekanan Ketua Bersama Pertemuan ke-64 COCC Malindo kepada Ketua Tim Perancang sebagai berikut: Pertama TPI, dengan detail meliputi (a) Melaksanakan jadwal yang telah disepakati dengan segala kegiatan yang telah direncanakan; (b) Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan antara intelijen dengan pihak keamanan lainnya dan melakukan pengawasan secara intens untuk mencegah segala kegiatan ilegal dapat yang terjadi baik di darat atau laut; (c) Melakukan peningkatan kerja sama dan pertukaran informasi antara PDRM dan Polri (Reserse Kriminal dan Antiteror) serta BNN guna mencegah dan membendung tindak kejahatan lintas batas yang terkait dengan ancaman teroris

³³ Portal PPID Tentara Nasional Indonesia, "Pertemuan ke-64 COCC Malindo Tahun 2017 di Jakarta", diakses pada 18 Maret 2019, <https://ppid.tni.mil.id/view/32435981/pertemuan-ke-64-cocc-malindo-tahun-2017-di-jakarta.html>.

dan juga peredaran narkoba; (d) Mengadakan pertemuan antara intelijen dengan instansi terkait yang bertugas di wilayah perbatasan guna mencegah kegiatan ilegal yang merugikan kedua negara dan memudahkan ketua TPI untuk berkoordinasi; dan (e) Melakukan peningkatan kerjasama melalui *point of contact* (POC) instansi/agensi yang bertanggung jawab terhadap keamanan untuk menangani berbagai kegiatan ilegal dan isu-isu yang timbul di wilayah perbatasan kedua negara.

Kedua TPOD, dengan detail meliputi (a) Melakukan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati dan sesuai yang telah direncanakan; (b) Melaksanakan rencana penempatan LO di Sintang dan Sibu dengan berkoordinasi secara efektif sehingga dapat segera terlaksana dan dapat dilaporkan pada Sidang HLC Malindo mendatang; (c) Melakukan koordinasi guna mencegah berbagai tindakan ilegal di perbatasan sekaligus memonitor patok-patok perbatasan kedua negara antara pasukan pengamanan perbatasan kedua negara; dan (d) Mempererat silaturahmi yang telah ada antara TNI AD, TDM dan masyarakat di wilayah perbatasan darat kedua negara guna terciptanya keamaan di wilayah perbatasan darat antara RI-Malaysia serta meningkatkan rasa kekeluargaan, saling peduli dan saling melindungi.

Ketiga TPOL, dengan detail meliputi: (a) Melakukan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; (b) Mengecek ulang dan menyempurnakan sistem SCIM agar pertukaran informasi antara KRI dan KD dapat terlaksana dengan baik; dan (c) Melakukan kegiatan *sharing knowledge* untuk membahas permasalahan strategis Selat Malaka guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil yang terlibat dalam Patkor Malindo antara TNI AL dan TLDM di sela-sela acara pembukaan Patkor Kastima.

Keempat TPOU, dengan detail meliputi: (a) Merealisasikan kegiatan yang telah disepakati dan direncanakan sesuai dengan jadwal; (b) Melakukan koordinasi secara intensif guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi pertahanan udara di

perbatasan udara antar kedua negara; dan (c) Melakukan koordinasi yang baik guna membahas secara detail terkait penambahan ALO di kedua tenaga.

Kelima TPOM, dengan detail meliputi: (a) Merealisasikan segala kegiatan yang direncanakan dan sesuai jadwal yang telah disepakati; (b) Meningkatkan koordinasi dengan baik antara badan atau agensi terkait agar tercipta keamanan di wilayah maritim kedua negara; (c) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan Patkor Optima dan Kastima; dan (d) Koordinasi tersebut dilakukan antara TPI, TPOL dan TPK guna memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kedua operasi tersebut.

Keenam KK SAR, dengan detail meliputi: (a) Melakukan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati dan sesuai yang telah direncanakan; (b) Protap SAR Malindo menjadi pedoman Kelompok Kerja SAR sehingga pelaksanaan *search* dan *rescue* dapat berjalan sesuai dengan prosedur; dan (c) Meningkatkan koordinasi yang baik guna terciptanya kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat.

Ketujuh TPK, dengan detail meliputi: (a) Melakukan segala kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan disepakati; (b) Melanjutkan komunikasi dengan memberdayakan radio HF dan Secured Internet Malindo (SCIM) secara terus-menerus di antara kedua negara; dan (c) Penginstalan radio HF di pos-pos Gabma untuk kepentingan operasi guna meningkatkan koordinasi.

Sesuai dengan batas wilayah masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia memiliki sektor masing-masing agar pelaksanaan operasi patroli berjalan secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih. Indonesia sendiri bertanggung jawab atas wilayah Aceh sampai dengan Batam, sedangkan Malaysia bertanggung jawab atas wilayah Langkawi hingga Johor.

Aset utama yang digunakan dalam Operasi Patkor Kastima yaitu kapal besar dan kapal kecil sebagai alat untuk operasi laut. Selain itu, Bea Cukai juga menggunakan beberapa *software* dalam Operasi Patkor Kastima, yaitu Cost Survey Land System

yang digunakan untuk mendeteksi kapal yang keluar dan masuk wilayah pabean, Open Source Automatic Magazine System yang digunakan untuk melaporkan kecepatan, haluan, dan berat yang dibawa oleh kapal serta mendeteksi kapal, dan Ceisa yang digunakan sebagai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau sarana pelaporan saat ada kapal masuk ke wilayah pabean sekaligus berguna untuk mendeteksi kapal.³⁴

Setiap gerakan dalam Operasi Patkor Kastima memiliki sandi masing-masing yang selalu dinamis. Hal tersebut tergantung pada saat pelaksanaan di lapangan dan sesuai instruksi ketua lapangan.³⁵ Dalam melaksanakan operasi, Bea Cukai tidak hanya bekerja sama dengan Kastam Malaysia saja, tetapi juga dengan aparat keamanan yang lain, seperti Polri, BNN, dan TNI.

Ruang lingkup Operasi Patkor Kastima yaitu adanya pertukaran intelijen untuk bertukar informasi. Selain itu, Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia melakukan pertukaran duta atau petugas di lapangan.³⁶ Pada periode pertama, Bea Cukai telah berhasil dilakukan tepatnya saat Patkor Kastima ke-24 tahun 2017. Nilai total barang bukti ditaksir sebesar Rp 1.393.333.500,00 dengan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 479.538.812,00. Adapun jenis penyelundupan yang berhasil ditindaklanjuti yaitu sebanyak 12 kali, yaitu delapan kapal penyelundupan bawang merah dengan total barang bukti sebanyak kurang lebih 147 ton bawang merah, satu kapal membawa 51 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) (*human trafficking*), serta tiga kapal membawa barang campuran tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ-01.

Sementara di periode kedua, nilai total barang bukti ditaksir sebesar Rp 2.096.260.000,00 dengan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp

³⁴ Khenang, Pelaksana Sub-Direktorat Patroli Laut, Wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019.

³⁵ Khenang, Pelaksana Sub-Direktorat Patroli Laut, Wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019.

³⁶ Khenang, Pelaksana Sub-Direktorat Patroli Laut, Wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019.

622.019.750,00.³⁷ Pada periode ini, Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 20 kali dengan bermacam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh *trafficker*. Delapan kapal ditegah karena memuat barang tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ-01. Sebelas kapal ditegah karena memuat dokumen tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan serta satu kapal membawa 42 orang TKI.³⁸ Dari segi komoditas, yang ditegah merupakan jenis barang campuran, peralatan elektronik, bahan bangunan, kayu bakau dan kayu nireh, besi, bawang, dan manusia.

Data penindakan yang telah tercatat oleh Bea Cukai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, Bea Cukai menunjukkan bahwa terdapat 178 penindakan dengan nilai barang hasil penindakan (BHP) mencapai lebih dari Rp 189.000.000.000,00 dan potensi penyelamatan penerimaan negara mencapai lebih dari Rp 29.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2016 penindakan meningkat tajam hingga mencapai 405 penindakan dengan nilai BHP mencapai Rp 247.000.000.000,00 dan potensi penyelamatan penerimaan negara mencapai Rp 113.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2017 data penindakan sementara Bea Cukai menurun menjadi 279 kasus pelanggaran di laut dengan nilai BHP yang melonjak menjadi Rp 551.000.000.000,00 dengan potensi penyelamatan penerimaan negara yang juga naik menjadi Rp 425.000.000.000,00.³⁹

³⁷ "Patkor Kastima, Upaya Indonesia dan Malaysia Jaga Kawasan Selat Malaka", Bea Cukai, diakses pada 3 Februari 2019, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-upaya-indonesia-dan-malaysia-jaga-kawasan-selat-malaka.html>.

³⁸ "Patkor Kastima, Upaya Indonesia dan Malaysia Jaga Kawasan Selat Malaka", Bea Cukai, diakses pada 3 Februari 2019, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-upaya-indonesia-dan-malaysia-jaga-kawasan-selat-malaka.html>.

³⁹ "Patkor Kastima, Upaya Indonesia dan Malaysia Jaga Kawasan Selat Malaka", Bea Cukai, diakses pada 3 Februari 2019, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-upaya-indonesia-dan-malaysia-jaga-kawasan-selat-malaka.html>.

Dengan terbentuknya kerja sama ini melalui Operasi Patkor Kastima dapat menjaga peran institusi negara dalam menciptakan keamanan jalur lalu lintas kapal internasional di Selat Malaka sehingga potensi kejahatan transnasional dapat ditekan.⁴⁰

Dalam kerja sama kepabeanean Patkor Kastima, hak dan wewenang Indonesia dan Malaysia setara, tidak ada negara yang menjadi *superpower* atau negara yang menjadi *periphery*. Masing-masing negara menggunakan teritorinya sendiri. Wilayah operasi tersebut meliputi sepanjang Selat Malaka, mulai dari perairan Batam hingga perairan Kuala Langsa.

Sedangkan tindak lanjut saat operasi berlangsung sesuai dengan UU yang berlaku.⁴¹ Apabila *trafficker* menyelundupkan narkoba, maka Bea Cukai berhak melakukan penindakan dan setelah itu akan dilimpahkan kepada BNN atau Polri untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian, untuk penentuan hukuman akan dilimpahkan kepada pengadilan. Namun, jika *trafficker* menyelundupkan TKI, maka Bea Cukai akan melimpahkannya kepada Badan Imigrasi.

Dampak Kerja Sama Kepabeanean Patkor Kastima

Operasi Patkor Kastima merupakan kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia-Malaysia yang berfokus kepada bidang kepabeanean. Dalam menjalin kerja sama tentunya kedua negara saling memiliki rasa *interdependence*. Operasi Patkor Kastima tentu memiliki banyak sekali dampak pada kedua negara tersebut. Dampak dari adanya kerja sama kepabeanean ini adalah untuk menjalin koordinasi dan hubungan yang lebih erat dengan Malaysia.

Selain itu, dampak dari kerja sama kepabeanean Patkor Kastima dalam bidang perekonomian adalah meningkatnya penerimaan negara. Dengan adanya kerja sama

⁴⁰ "Patkor Kastima, Upaya Indonesia dan Malaysia Jaga Kawasan Selat Malaka", Bea Cukai, diakses pada 3 Februari 2019, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-upaya-indonesia-dan-malaysia-jaga-kawasan-selat-malaka.html>.

⁴¹ Khenang, Pelaksana Sub-Direktorat Patroli Laut, Wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019.

ini, penyelundupan barang ilegal, khususnya di Indonesia kini telah berkurang dan penerimaan negara menjadi lebih baik karena operasi ini berkaitan erat dengan penerimaan negara.⁴² Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil yang didatangi oleh kapal-kapal asing untuk menyelundupkan barang-barang yang dilarang oleh UU di Indonesia.

Analisis Kerja Sama Patkor Kastima

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia serta berbagai referensi yang ditemukan. Menurut teori kerja sama internasional, adanya kerja sama kepabeanan ini memiliki kepentingan tersendiri, selain untuk menjaga Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan tertentu. Namun dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa Indonesia menjalin kerja sama kepabeanan Patkor Kastima dengan tujuan menjalin koordinasi yang baik serta hubungan persahabatan yang kuat dengan Malaysia. Namun, di balik itu, Indonesia juga memiliki keuntungan dalam kerja sama ini, yaitu dengan adanya peningkatan terhadap penerimaan negara.

Patkor Kastima sebagai media kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia-Malaysia memiliki berbagai dampak, misalnya dari adanya data penindakan pada saat operasi dan kenaikan BHP setiap tahun. Berdasarkan data dari Bea Cukai Pusat, peneliti menemukan bahwa penindakan adanya penyelundupan di tiap perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama Selat Malaka kini telah mampu diminimalisir. Hal tersebut karena adanya kerja sama yang telah terjalin oleh badan bea cukai Indonesia dan Malaysia. Selain dapat meminimalisir adanya penyelundupan barang, Operasi Patkor Kastima juga dapat menyelamatkan produk-produk dalam negeri untuk

⁴² Khenang, Pelaksana Sub-Direktorat Patroli Laut, Wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019.

dieksposkan pada masyarakat. Serta, dengan meningkatnya BHP maka dapat juga mempengaruhi penerimaan negara.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti memiliki asumsi bahwa Patkor Kastima sebagai media kerja sama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia sangat efektif dalam mencegah adanya penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Selat Malaka. Karena, dengan adanya operasi ini, segala bentuk penyelundupan yang dilakukan oleh para *trafficker* dapat diminimalisir dengan cara penindakan langsung.

Kesimpulan

Dari adanya pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama kepabeanan Indonesia-Malaysia telah berjalan sejak adanya Patkor Kastima. Patkor Kastima adalah kerja sama yang bergerak di bidang kepabeanan dengan cara operasi laut. Kerja sama Patkor Kastima ini dibuktikan dengan adanya pertukaran informasi, intelijen, dan duta antara kedua negara saat patroli laut berlangsung. Operasi Patkor Kastima ini juga menjadi media dari terbentuknya kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia karena dengan adanya Patkor Kastima, hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia menjadi semakin membaik. Tidak hanya itu, kedua negara juga mendapatkan keuntungan dari adanya operasi ini, seperti Indonesia yang saat ini memiliki keuntungan dari segi penerimaan negara yang meningkat. Karena dengan adanya operasi tersebut, segala bentuk penyelundupan barang telah diminimalisir secara berkala.

Referensi

- Aditya, Wisnu, “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba”. Skrip, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2017.
- Alya, Nurandini. “Indonesia-Malaysia Gelar Patkor Kastima untuk Jaga Selat Malaka”, diakses pada 11 November 2018, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/23/153100026/indonesia-malaysia-gelar-patkor-kastima-untuk-jaga-selatmalaka.html>.
- Bea Cukai. “Patkor Kastima Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, diakses pada 8 Desember 2018, <http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyataindonesia-malaysia-jaga-selat-malaka.html>.
- Burmansyah, Edy. “Internasionalisasi Selat Malaka”, diakses pada 24 Januari 2019, <https://indoprogess.com/2016/06/internasionalisasi-selatmalaka/>.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Coplin, William. *Pengantar: Politik Internasional Suatu Telaah* (Terjemahan Mercedes). Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2011.
- Dougherty, James E. dan Pfaltzgraff. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher, 1997.
- Emmers, Ralf. *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*. Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003.
- Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, 1987.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Istiqomah, Ratih Nur. “Strategi Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015”. Skrip, Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
- Kartasasmita, Koesnadi. *Organisasi Internasional*. Bandung: Binacipta, 1982.

- King, John C. "Qualitative Research Method in International Affairs for Master Students". *Journal of American University*, 95, 2015. https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Lamont, Christopher. *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications Ltd., 2015.
- Moravcsik, Andrew. "Trust, but Verify: The Transparency Revolution and Qualitative International Relations", dalam Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Natiqoh. "Kebijakan ASEAN dalam Menangani Masalah Drugs Trafficking di Indonesia Periode 2003 - 2008". Skrip, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Perwita, A. A. dan Yani, Y. M. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Plano, Jack C. dan Olton, Ray. *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin). Bandung: Putra A. Bardin, 1979.
- Portal PPID Tentara Nasional Indonesia. "Pertemuan ke-64 COCC Malindo Tahun 2017 di Jakarta", diakses pada 18 Maret 2019, <https://ppid.tni.mil.id/view/32435981/pertemuan-ke-64-coccmalindo-tahun-2017-di-jakarta.html>.
- Sarah, Omi. "Model Kebijakan Halal Tourism yang Diterapkan dalam Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat". S.Sos., Skrip, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Setiawan, Dodiet Aditya. *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes, 2013.
- Br Sitepu, Ria Ariesti. "Kerja Sama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia". Skrip, Universitas Diponegoro Semarang, 2018.
- Smith, Michael dan Hocking, Brian. *World Politics: An Introductory to International Relations*. Harvester Wheatsirf, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Viorti. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Boston: Ally and Bacon, 1987.